



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau

Walikota untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten setiap daerah kabupaen dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Ogan Ilir melalui Dinas PMD menerima:
  - a. Copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES);
  - b. Copy Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

- d. Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;
  - e. Copy Desain dan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. Copy SPJ Siskeudes tahap sebelumnya;
  - g. Dokumen penyaluran yang berisi antara lain:
    - 1) Rekomendasi Camat
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap berjalan
    - 3) Berita Acara Sertifikasi Pemeriksaan Lapangan beserta lampiran hasil perhitungan fisik oleh PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur)
    - 4) Foto progres sesuai dengan yang disalurkan tahap sebelumnya;
    - 5) Berita Acara Pemeriksaan Laporan Keuangan
  - h. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk fisil (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Ogan Ilir melalui Dinas PMD menerima :
- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2020;
  - b. Foto Copi SPJ keuangan tahap I tahun anggaran 2020 yang dilegalisir oleh kepala desa;
  - c. Copy SPJ Siskeudes
  - d. Dokumen penyaluran yang berisi antara lain:
    - 1) Rekomendasi Camat
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap berjalan
    - 3) Berita Acara Sertifikasi Pemeriksaan Lapangan beserta lampiran hasil perhitungan fisik oleh PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur);
    - 4) Foto progres sesuai dengan yang disalurkan tahap sebelumnya;
    - 5) Berita Acara Pemeriksaan Laporan Keuangan
  - e. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - f. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk fisil (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Ogan Ilir melalui Dinas PMD menerima :
- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020;
  - b. Foto Copi SPJ keuangan tahap II tahun anggaran

2020 yang dilegalisir oleh kepala desa;

- c. Copy SPJ Siskeudes
  - d. Dokumen penyaluran yang berisi antara lain:
    - 1) Rekomendasi Camat
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap berjalan
    - 3) Berita Acara Sertifikasi Pemeriksaan Lapangan beserta lampiran hasil perhitungan fisik oleh PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur);
    - 4) Foto progres sesuai dengan yang disalurkan tahap sebelumnya;
    - 5) Berita Acara Pemeriksaan Laporan Keuangan
  - e. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap III berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II;
    - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen) dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 10 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- a. Untuk Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)

2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
  3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen)
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

#### Pasal 11 B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal :

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
  - (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
    - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
  - (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
    - a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
    - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    - c. pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-1);
    - d. pandemic flu burung
    - e. wabah penyakit cholera; dan/atau
    - f. penyakit menular lainnya.
  - (2) penanganan dampak pandemic COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya  
pada tanggal, - 14 Mei 2020

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 14 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020 NOMOR 40**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan Di Indralaya  
pada tanggal, 4 Mei 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 4 Mei 2020

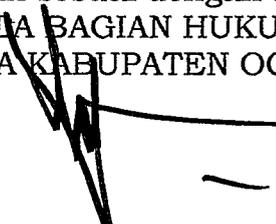
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ALEX MERWANDI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 196404041984111002